POLA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KLASIK

Rahmawaty Rahim

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri No. 1, KM. 3,5 Palembang

Abstrak: Fund is like blood flowing to all parts of the human body, if there is human blood deficiency therefore sooner or later death will be the result . Similarly toward education funding, regardless of the cost of all planned programs will likely not be operationalized. Problem of the high cost of higher education is perceived by the public on the one hand, and the desire to provide a better education on the other hand has always been a problem that still can not be resolved satisfactory . When we look at the history of the heyday of Islam, funding institutions apparently has got the most attention from the education providers and other parties that are not directly involved in it. While the pattern of management education in the classics are implemented in two ways: 1. Centralized systems, centralized point here is that education funding is planned and managed by bureaucrats (power authority), not by the institution concerned. All educational needs will be met by the government through the state treasury or the Bayt al-Maal. 2. Decentralized system is more flexible and participatory than centralized systems, which consist of the traditional pattern (the traditional pattern of the proceeds are typically used without a clear plan), and non-traditional pattern, this pattern is the antithesis of the traditional pattern, incoming funds managed by organizers of the institution, through a targeted plan according to the situation and condition of the institution concerned.

Keynote: patterns of financing, Islamic Education, classical era

A. Pendahuluan

Salah satu fitrah esensial manusia ialah pendidikan, melalui pendidikan manusia dapat dididik guna mengenal beragam konsep bagi keberlangsungan hidupnya menuju arah yang dicita-citakan. Pendidikan sangat urgen karena pendidikan, adalah agen perubahan dan transformasi tata nilai yang terorganisir dengan baik. Karena itu pendidikan merupakan aset umat yang perlu dijaga eksistensi dan kesinambungannya. Kontinuitas kegiatan suatu lembaga pendidikan sangat berkaitan dengan berbagai faktor, salah satu diantara faktor tersebut adalah faktor biaya. Biaya adalah merupakan permasalahan yang teramat penting bagi keberlangsungan hidup dari suatu lembaga pendidikan.

Dana / biaya bagaikan darah yang mengalir pada seluruh bagian tubuh manusia, jika manusia kekurangan darah maka cepat atau lambat pada akhirnya ajal siap menjemputnya. Demikian pula dengan dana pendidikan, tanpa biaya semua program yang direncanakan tidak mungkin akan bisa dioperasionalkan. Problem mahalny biaya pendidikan tinggi yang dirasakan masyarakat disatu sisi, serta keinginan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik pada sisi yang lain senantiasa menjadi masalah yang tak kunjung mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.

Apabila kita sejenak, melihat kembali sejarah masa lampau, masalah pembiayaan lembaga pendidikan ternyata telah mendapat perhatian yang besar dari

para penyelenggara pendidikan maupun pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung di dalamnya. Umat Islam pada masa tersebut sudah memahami benar mengenai perlunya biaya yang besar guna membangun dan mengelola lembaga pendidikan yang bermutu. Sebagaimana dijelaskan Mahmud Yunus bahwa Nizham Al-Mulk mengeluarkan anggaran belanja yang luar biasa besarnya untuk membiayai pendidikan. Beliau mengeluarkan biaya sebanyak 600.000 dinar atau lebih dari 100 trilyun setiap tahunnya untuk seluruh madrasah yang diasuh oleh negara (Yunus, 1966 : 63).

Di berbagai negara maju yang kualitas sumber daya manusia (SDM) nya tinggi anggaran pendidikan sudah mencapai di atas 20 % dari GNP. Bandingkan dengan berbagai negara berkembang (yang sumber daya manusianya rendah) yang mengeluarkan dana kurang dari 10%, bahkan ada yang kurang dari 5% dari anggaran belanja negaranya (Langgulung, 1992 : 13-19).

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pola pembiayaan lembaga pendidikan pada masa Islam klasik meliputi sumber dana pendidikan dan pola pengelolaan dana pendidikan. Guna dijadikan bahan perbandingan bagi problema biaya pendidikan di negara Indonesia sekarang ini.

B. Sumber Biaya Pendidikan Pada Masa Klasik

1. Subsidi Negara

Sejak masa Khulafaur Rasyidin, para penguasa dan pemimpin muslim memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan dan menghidupi berbagai sarana penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan, termasuk lembaga-lembaganya. As-Suffah (salah satu ruangan masjid yang digunakan untuk mengajar para sahabat sekaligus sebagaipondokan bagi mereka yang sangat miskin) yang menjadi salah satu model pendidikan Islam di Madinah, tersebar luas ke luar Madinah sejalan dengan penyebaran Masjid. Keberlangsungan As-Suffah ini sangat diperhatikan oleh Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab senantiasa mengangkat para sahabat rasul yang memiliki pengetahuan agama yang luas sebagai gubernur dan panglima. Mereka banyak mendirikan masjid dengan As-Suffah di dalamnya, kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalamnya dibantu pembiayaannya dengan dana pemerintah yang tersedia (Nata, 2004 : 218).

Pada masa Umayyah di daerah-daerah baru, dimana bahasa Arab bukan merupakan bahasa pertama dan Al-Qur'an belum dikenal, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan seperti kuttab dan masjid menjadi tujuan utama para khalifah dan gubernur setempat. Dimana pendanaan lembaga-lembaga tersebut sangat tergantung dengan pemerintah sebagai pemerakarsa.

Selanjutnya pada masa Abbasiyah, banyak bermunculan Masjid Jami' (masjid yang bangunannya besar yang dihiasi dengan indah melalui biaya negara) yang berfungsi sebagai tempat diumumkannya berbagai hal tentang negara dan agama pada masyarakat yang di dalamnya banyak terdapat halaqoh-halaqah yang dipimpin oleh seorang syaikh yang diangkat oleh seorang khalifah untuk mengajarkan bidang kajian tertentu. Dimana biaya keberadaan dan operasionalnya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (Stanton, 1994 : 35).

Dimasa Turki Saljuk banyak madrasah-madrasah yang didirikan dan dilembagakan dibawah penguasaan dan bantuan negara. Banyak sekali dana-dana yang dialokasikan untuk mendirikan dan memelihara sekolah-sekolah ini, antara lain dengan memberikan beasiswa yang besar, pensiun dan ransum yang diberikan kepada para mahasiswa yang patut menerimanya (Nata, 2004 : 220).

2. Waqaf

Waqaf pada asalnya mengekalkan yang asal dan memanfa'atkannya untuk kebaikan, yang asal dalam waqaf adalah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT (Langgulong, 1992 : 155). Waqaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang berhubungan dengan harta benda. Sebagai salah satu bagian dari sistem pendanaan pendidikan, wakaf menjadi semacam lembaga yang terorganisir dengan baik dan menjadi mode di masa Abbasiyah terutama pada masa keemasan peradaban Islam. Khalifah Al-Makmun diaanggap sebagai pemerakarsa berdirinya badan-badan waqaf untuk lembaga pendidikan, sehingga pembiayaan beragam kegiatan keilmuan, termasuk gaji para ulama'nya dapat berlangsung terus dan kokoh. Prakarsa Al-Makmun ini kemudian meluas kepada para penggantinya dan para pembesar-pembesar negara, sehingga badan waqaf yang permanen dipandang sebagai suatu keharusan dalam mendirikan suatu lembaga ilmiah. Harta yang dijadikan waqaf ini kebanyakan merupakan aset ekonomi yang berjalan seperti tanah pertanian, rumah, toko, ladang, sawah, pabrik dan sebagainya, dana yang dihasilkan akan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi pada waktu itu.

Oleh karenanya, tingkat kehidupan para pelajar dan pengajar yang dibiayai oleh hasil waqaf berubah-ubah dari waktu ke waktu. Meskipun demikian peranan waqaf sangat membantu pelaksanaan pendidikan. Dengan dana waqaf, umat islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu, para pelajar dan orang tua mereka tidak terbebani dengan berbagai macam biaya yang diambil untuk kegiatan pendidikan (Nata, 2004 : 233).

Di masa Islam klasik Lembaga-lembaga pendidikan yang dihidupi oleh sistem waqaf ini banyak sekali antara lain seperti Badr ibn Hasanawaih Al-Kurdi, seorang bangsawan kaya yang menjadi gubernur, mendirikan 3000 masjid dengan akademi di dalamnya. Masing-masing masjid memiliki asrama (Masjid Khan) (Stanton, : 44-45). Waqaf Abdul Latif satu dirham diberikannya setiap hari sampai maut memisahkan mereka (Syalabi, : 137).

Para siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau yang belajar atas inisiatif dan biaya sendiri, umumnya mereka belajar sambil bekerja guna membiayai pendidikannya.

3. Sumber Lain

Pandangan bahwa ilmu agama, terutama al- Qur'an harus diajarkan pada orang lain sebagai salah satu bentuk ibadah `ammah mendorong para pengajarnya untuk tidak meminta dan tidak menerima bantuan finansial dari siapapun. Mereka berusaha untuk membiayai kehidupan dan kegiatan pendidikannya hanya dari hasil keringat mereka sendiri diluar kegiatan mengajar. Abu Al-Abbas Al-Ashamm, salah seorang ulama besar dan ahli hadits di Khurasan tidak mau mengambil upah ketika beliau mengajarkan hadits. Beliau memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari hasil usahanya sendiri (Nata, 2004 : 223).

Banyak sekali cerita-cerita dari literatur Arab yang menjelaskan bahwa para pengajar dan pendidik duduk memberikan materi pelajaran pada masyarakat tanpa mengharapkan bayaran sedikitpun. Salah seorang diantaranya adalah Kamaluddin Abu Al-Barakat Al-Anbary, (seorang ahli Fiqh dan Nahwu), senantiasa membukakan pintu rumahnya bagi para penuntut ilmu, semata-mata karena Allah. Bahkan para guru yang mengajar para kanak-kanakpun tidak menerima bayaran apa-apa, seperti Al-Dhahak ibnu Muzahim dan Abdullah ibn Harits, bahkan mereka bersedia membiayai sendiri kegiatan pendidikan tersebut (Nata, 2004 : 224).

Disamping para pengajar yang mempunyai keinginan dan kesadaran di atas, banyak para hartawan & demawan yang mengeluarkan sejumlah dana guna membiayai berbagai lembaga pendidikan dan kegiatannya Antara lain, Al-Hakam II (961 M-976 M)

membuka sejumlah kuttab di Kardova. Guru-gurunya digaji dari kantongnya sendiri dan materi pelajaran yang diberikan kepada siswa-siswanya, selain Al- Qur'an, adalah menulis prosa, puisi, *grammar* dan kaligrafi (Supardi, 2003 : 13).

C. Pola Pengelolaan Dana Pendidikan

Pola pengelolaan dana pendidikan pada masa klasik dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Sentralisasi

Maksud sentralisasi disini adalah dana pendidikan yang direncanakan dan dikelola oleh birokrat (pemegang otoritas kekuasaan), bukan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Menurut sejarah pendidikan Islam, lembaga-lembaga pendidikan formal yang didanai oleh negara, tidak memiliki Otoritas untuk mengatur sumber keuangan yang memang tidak dimilikinya. Semua kebutuhan pendidikan akan dipenuhi oleh pemerintah melalui kas negara atau baitul al-maal. Karenanya eksistensi lembaga pendidikan sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah terhadap sektor pendidikan, atau perhatian khalifah atau penguasa terhadap lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan secara umum.

Dar al-Hikmi di Cairo yang didirikan oleh Al-Hakim bin Amrillah pada tahun 1004 M. menghabiskan kira-kira 257 dinar setiap tahun dari kas negara guna beragam keperluan diluar gaji guru dan karyawan. Dana tersebut digunakan untuk membeli kertas, tikar, gaji pemimpin perpustakaan, air, gaji pesuruh, keperluan para pengajar/ulama, perbaikan kain, pintu, menjilid buku, membeli permadani» Sedangkan Ahmad, raja Idzadj, membagi hasil pajak negaranya menjadi tiga bagian, sepertiganya disediakan guna membiayai pendidikan dan pengajaran di sudut-sudut masjid dan di sekolah-sekolah.

Waqaf yang digunakan sebagai model pendanaan berbagai lembaga pendidikan Islam ini, juga tidak terlepas dari sistem terpusat (sentralisasi). Pemberi waqaf seringkali menentukan pola pengelolaan harta waqafnya dan pembagian yang jelas dari harta hasil waqaf tersebut dalam dokumen waqaf, tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan situasi dan kebutuhan lembaga pendidikan tersebut di belakang hari. Selain itu mereka sering menentukan diri mereka atau ahli warisnya sebagai penanggung jawab dalam mengelolah harta waqaf tersebut.

2. Desentralisasi

Sistem desentralisasi ini lebih bersifat fleksibel dan partisipatif dibanding sistem sentralisasi. Sistem desentralisasi keuangan pendidikan, merupakan pola manajemen keuangan lembaga pendidikan yang bukan hanya berorientasi pada Kebutuhan riil lembaga tersebut dalam segala perubahannya, tapi juga pengelolaannya tidak memiliki otoritas mutlak. Pola desentralisasi ini dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu: *Pertama, tradisional*. Pada pola tradisional ini dana yang diperoleh biasanya digunakan tanpa perencanaan yang jelas. Beragam kebutuhan operasional pendidikan akan dapat dipenuhi tatkala ada pemasukan dari sumber-sumber dana, seperti orang tua siswa, siswa, para dermawan dan para pengajar itu sendiri. tetapi manakala sumber dana kosong maka semua kebutuhan pendidikanpun menjadi tertunda, menunggu setelah adanya sumber dana lagi.

Lembaga-lembaga pendidikan non formal banyak yang memakai pola pengelolaan desentralisasi dengan corak tradisional ini. Salah satu contohnya *kuttab* yang banyak tersebar diberbagai lokasi, banyak yang diselenggarakan dengan cara sederhana tanpa campur tangan pemerintah dengan roti sebagai pemasukan dana pendidikan ditambah sedikit uang pada masa *khatam* Al- Qur'an. Para ulama yang menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar pun tidak pernah mengelola input sukarela ditangannya dengan perencanaan dan manajemen yang terarah. Para ulama tersebut hanya akan memenuhi kebutuhan operasiual pendidikannya dengan dana yang tersedia, atau ditambah dengan dana dari kantongnya sendiri maupun dari sumbangan tambahan yang dicari.

Kedua, Non tradisional. Pola ini merupakan antitesis pola tradisional, dana yang masuk dikelola oleh penyelenggara lembaga pendidikan tersebut, melalui rencana yang terarah sesuai dengan situasi dan kondisi lembaga yang bersangkutan. Sistem waqaf dapat menjadi contoh dalam pola ini. Dalam dokumen waqafnya, pemberi waqaf tidak mengbariskan dirinya, keluarganya, ataupun orang-orang tertentu diluar pengelola lembaga pendidikan tersebut sebagai pengelola harta waqaf.

Dalam dokumen waqaf madrasah Asy-Syamiyah al-jawwaniyyah dicantumkan dengan jelas materi-materi kekayaan waqaf, kebutuhan riil yang akan dipenuhinya, dan cara pengelolaan harta tersebut. "Bismillahirrahmanirrahim..." Adapun barang-barang yang diwaqafkan untuk biaya-biaya gedung, para fuqaha dan siswa serta keperluan-keperluan lain ialah semua desa "Bazinah", semua bagian yang diperoleh dari perkebunan "Jirmana", yakni 11,5 bagian dari 24 bagian, semua bagian yang diperoleh dari desa "A-Tinah", yaitu 14 ditambah 7 bagian dari 24 bagian, separuh dari desa "Majidal As-Suwaida", serta seluruh desa "Majidal AlQarjah, sedangkan pembiayaan Sekolah ini adalah:

Prioritas untuk gedung-gedung sekolah.

Untuk para ustadz, dibagikan sekarung gandum, sekarung syair, dan uang perak Nashiriyyah sebanyak 130 dirham.

Sepersepuluh dari sisanya untuk honor pengawas (Nazhir) waqaf.

300 dirham uang perak Nashiriyyah digunakan untuk bahan-bahan makanan dan kue-kue untuk *nisfu syakban* menurut pendapat *Nazhir* waqaf.

Sisanya diberikan kepada para fuqaha, siswa-siswa, muadzin dan pelayan dengan ukuran jumlahnya menurut pendapat kepala sekolah ataupun untuk tidak mendapatkannya sama sekali.

D. Penutup

Pola pengelolaan dana pendidikan pada masa klasik terbagi pada dua pola yaitu *pertama, pola sentralisasi*, yang diaplikasikan pada lembaga-lembaga pendidikan formal yang dibiayai oleh pemerintah melalui kas negara dan waqaf. Semua anggaran belanja diatur sesuai dengan pola pemegang otoritas kekuasaan lembaga pendidikan tersebut. *Kedua, pola desentralisasi*, dimana penyelenggara dan pengurus lembaga pendidikan memiliki hak penuh untuk mengatur dananya. Pola desentralisasi ini sebagian besar diaplikasikan pada lembaga-lembaga pendidikan informal dan sebagian kecil pada lembaga pendidikan formal. Sistem pendanaan pendidikan Islam (sumber dana dan pengelolaannya) pada masa klasik bervariasi, tergantung pada lembaga pendidikan itu sendiri, pada pemberi dan pada pengelola dana tersebut.

Daftar Pustaka

- Langgulong, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992).
- Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004) Cet. ke I.
- Stanton, Charles Michael, *Higher Learning of Islam: The Classical Priod A.P. 700-1300*, Meryland: Remand and Little-field Publisher, 1990).
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, (terj.) Muchtar Yahya dan Sanusi latief (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- Soekarno dan Ahmad Supardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung; Angkasa, 1985).
- Yunus Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1992).